

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik merupakan isu krusial yang terus menjadi perhatian di sektor pemerintahan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*), pemerintah Indonesia mengarahkan perhatian pada penguatan sistem pengendalian intern. Salah satu bentuk implementasi modern dari sistem ini adalah *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR), yaitu pengendalian internal yang fokus pada penyajian laporan keuangan yang andal dan sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Meskipun ICoFR telah mulai diperkenalkan secara luas di kementerian dan lembaga, namun penerapannya di level pemerintah daerah, termasuk SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), masih belum optimal. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masih ditemukan kelemahan signifikan dalam pengendalian intern pada sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Bengkalis. Beberapa laporan menyebutkan temuan terkait ketidaktepatan pencatatan aset, pelaporan yang tidak tepat waktu, serta ketidaksesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

ICoFR secara teoritis mengacu pada kerangka kerja pengendalian intern COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), yang terdiri atas lima komponen: *control environment*, *risk assessment*, *control activities*, *information and communication*, dan *monitoring*. COSO menekankan pentingnya integrasi pengendalian dalam proses pelaporan keuangan agar organisasi dapat memberikan laporan keuangan yang dapat dipercaya (COSO, 2013). Penerapan ICoFR dengan baik diyakini akan memperkecil kesalahan pencatatan, meningkatkan akurasi, dan menumbuhkan kepercayaan publik.

Secara teoritis, penelitian ini didukung oleh teori agensi (*agency theory*) yang menjelaskan bagaimana pengendalian internal dibutuhkan untuk mengurangi asimetri informasi antara pihak manajemen (*agent*) dan masyarakat atau pemilik dana (*principal*). Dalam konteks pemerintah daerah, masyarakat dan DPRD

bertindak sebagai principal yang membutuhkan jaminan bahwa dana publik digunakan dan dilaporkan secara benar. ICoFR menjadi alat untuk memitigasi risiko penyimpangan informasi dan memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi sebenarnya.

Beberapa studi mendukung hubungan antara pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan. Wijayati & Ananda (2023) dalam studi mereka mengungkapkan bahwa kelemahan dalam desain dan implementasi ICoFR berdampak signifikan terhadap ketidakakuratan laporan keuangan di Kementerian X. Penelitian tersebut menyoro bahwa meskipun secara struktural ICoFR telah dirancang, namun tidak semua unit kerja memahami fungsi dan pentingnya tiap komponen ICoFR dalam proses pelaporan (*Wijayati & Ananda, 2023, Jurnal Fair Value*).

Maghfira dan Wondabio (2023) dalam jurnal AFRE merancang optimalisasi PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan) untuk proses pengelolaan barang rampasan KPK. Penelitian ini menemukan bahwa kendala terbesar dalam pelaporan bukan hanya berasal dari sistem, tetapi dari minimnya pemahaman pelaksana terhadap ICoFR sebagai bagian integral dari pengelolaan data keuangan (*Maghfira & Wondabio, 2023, Jurnal AFRE*).

Kendati banyak penelitian telah membahas pentingnya pengendalian intern, namun kajian yang secara khusus menguji ICoFR dalam konteks pemerintahan daerah dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan SKPD masih sangat terbatas. Sebagian besar literatur fokus pada sektor swasta atau pada level kementerian, belum menyentuh kompleksitas pengelolaan keuangan di daerah yang memiliki karakteristik tersendiri, seperti ketergantungan pada transfer pusat, belanja berbasis kegiatan, dan penanganan aset tetap yang rumit.

Perbedaan mendasar antara konsep pendidik menurut Ramayulis dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional terlihat dari sudut pandang filosofis dan praktis. Ramayulis menempatkan Allah sebagai pendidik utama yang bersifat mutlak dan transenden, sementara pendidik manusia hanya berfungsi sebagai perantara yang menyampaikan ilmu serta membimbing sesuai dengan nilai-nilai ilahiah. Pandangan ini menekankan bahwa pendidikan sejatinya adalah proses menginternalisasi nilai-nilai ketuhanan ke dalam diri peserta didik.

Sementara itu, dalam perspektif Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik dipahami sebagai tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran. UU lebih menekankan pada aspek kompetensi, profesionalitas, dan tanggung jawab sosial dalam konteks penyelenggaraan pendidikan formal. Oleh karena itu, perbedaan yang menonjol terletak pada dasar filosofisnya, di mana Ramayulis memandang pendidik dalam kerangka teologis, sedangkan UU Sistem Pendidikan Nasional lebih menitikberatkan pada aspek legal dan profesional.

Kabupaten Bengkalis, sebagai salah satu daerah yang memiliki anggaran besar dari sektor migas dan transfer pusat, menghadapi tantangan tersendiri dalam menjaga akurasi dan transparansi laporan keuangannya. Temuan BPK beberapa tahun terakhir menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh atas penerapan sistem pengendalian, khususnya terkait proses pencatatan aset dan pengakuan belanja. Studi ini menjadi penting untuk menjawab apakah penerapan ICoFR telah mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD di daerah tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis, khususnya dalam memperluas pemahaman tentang efektivitas penerapan ICoFR di sektor publik daerah. Secara empiris, penelitian ini akan memberikan bukti apakah desain dan implementasi ICoFR dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD. Temuan dari studi ini juga akan bermanfaat bagi auditor internal, BPK, dan pemerintah daerah dalam merumuskan strategi penguatan pengendalian intern yang lebih aplikatif dan berbasis risiko.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya, dapat dilihat bahwa masih terdapat ketidakkonsistenan pada hasil penelitian mengenai penerapan *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf-paragraf di atas. Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan ICoFR terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD: Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dapat diangkat pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat penerapan *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis?
2. Apakah penerapan ICoFR berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah dikemukakan, adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk:

1. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan tingkat penerapan *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
2. Untuk menganalisis pengaruh penerapan ICoFR terhadap kualitas laporan keuangan SKPD secara empiris dalam konteks Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Penelitian ini akan memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat penerapan *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) di SKPD Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Temuan ini mencakup identifikasi kekuatan serta kelemahan dari sistem pengendalian pelaporan keuangan yang telah berjalan. Dengan pemahaman yang lebih terstruktur, pemerintah daerah dapat mengevaluasi efektivitas pengendalian intern yang ada, memperbaiki area yang masih lemah, serta memperkuat komponen pengendalian yang telah berfungsi optimal.

2. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, studi ini akan menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai sistem pengendalian intern, khususnya penerapan ICoFR di sektor publik.

Penelitian ini juga akan memperluas wawasan mengenai hubungan antara sistem pengendalian dan kualitas pelaporan keuangan daerah, serta tantangan tantangan kontekstual yang dihadapi oleh SKPD di tingkat kabupaten.

### 3. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Penelitian ini akan menjadi kontribusi ilmiah yang relevan dalam bidang akuntansi sektor publik, tata kelola keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal. Akademisi dan mahasiswa dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi dalam pengembangan teori maupun penelitian selanjutnya yang membahas efektivitas ICoFR dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah daerah.

## 1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan secara spesifik pada penerapan *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dengan ruang lingkup terbatas pada identifikasi tingkat implementasi ICoFR dan analisis pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan SKPD. Kajian ini akan mengevaluasi sejauh mana penerapan komponen-komponen utama ICoFR meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan mampu mendukung penyusunan laporan keuangan yang andal, tanpa melakukan perbandingan lintas daerah atau menganalisis aspek audit kinerja di luar cakupan pelaporan keuangan. Penelitian ini tidak akan mengevaluasi sistem manajemen risiko secara keseluruhan, melainkan fokus pada aspek pelaporan keuangan sesuai kerangka teoritis pengendalian intern yang berlaku.